

# *Economic Outlook NKRI 2008: Skenario 'Uneconomic Growth'*

**N. Rengka Johanes**



**D**ari Jakarta awal Januari 2008, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Susilo Bambang Yudhoyono, menulis 'positive outlook' tentang perekonomian NKRI tahun 2008. Bahwa pembangunan ekonomi NKRI pasca krisis tahun 1997/1998 telah memasuki arah yang tepat; kinerja fundamental perekonomian NKRI semakin kuat; sehingga perekonomian NKRI mam-

pu bertahan terhadap tekanan ekonomi global akibat lonjakan harga minyak dunia dan lesunya perekonomian Amerika Serikat (AS).<sup>1</sup> Sinyal positif prospek ekonomi NKRI tahun 2008, menurut Presiden RI Yudhoyono, antara lain karena produk pertambangan dan agrikultur NKRI relatif memiliki daya saing tinggi. Aliran investasi asing semakin naik.

<sup>1</sup> "World economic slowdown to have minimum impact on Indonesia," *Antara*, 2 Januari 2008.

Sedangkan ekonomi dunia diperkirakan merosot dari 5,2% tahun 2007 ke level 4,8% tahun 2008. Dalam hal ini, menurut Presiden RI Yudhoyono, skenario jangka pendek Pemerintah NKRI melakukan tiga upaya antisipasi yakni (1) mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif saat ini, (2) mendorong pembangunan infrastruktur, dan (3) memelihara stabilitas ekonomi makro.<sup>2</sup> Tantangannya ialah menjaga pertumbuhan positif saat ini dari tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi dan produk makanan, melanjutkan agenda reformasi, meningkatkan produksi industri dan ekspor, mempertahankan akurasi anggaran, dan mengantisipasi bencana alam.<sup>3</sup>

Hal ini diutarakan oleh Presiden RI Yudhoyono pada acara pembukaan perdagangan hari pertama merjer Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu, 2 Januari tahun 2008 di Jakarta.<sup>4</sup>

Presiden RI Yudhoyono juga memprediksi pertumbuhan ekonomi NKRI berkisar 7% tahun 2008, karena kenaikan konsumsi dan investasi sektor infrastruktur, khususnya listrik, power plants, jalan tol, dan perumahan. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi NKRI tahun 2007 berkisar 6%.<sup>5</sup> Prediksi itu kurang lebih setara dengan salah satu hasil *Reuters Poll* pada 19 Desember tahun 2007 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi NKRI bakal naik tahun 2008 karena kenaikan investasi, rendahnya tingkat suku bunga, dan peningkatan ekspor.<sup>6</sup>

Kurang lebih senada dengan Presiden RI Yudhoyono, Bak Dunia dari Singapura merilis prediksi *Global Economic Prospects 2008* awal Januari 2008 bahwa merosotnya perekonomian AS tidak mempengaruhi perekonomian global. Karena solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi dari faktor produksi dan kebijakan ekonomi dalam negeri negara-negara berkembang.<sup>7</sup> Perekonomian negara-negara ber-

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> "President: Indonesia eyes stronger economy in 2008," *Xinhua*, 2 Januari, 2008.

<sup>5</sup> "Indonesia's 2007 GDP growth seen above 6 pct - president," *Antara*, 2 Januari 2008.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> "Developing countries' growth 'to counter US slowdown'," *AFP*, 10 Januari, 2008.

kembang, termasuk NKRI, umumnya mencatat pertumbuhan sekitar 7,4% tahun 2007. Sedangkan pertumbuhan perekonomian AS merosot dari 2,9% tahun 2006 menjadi 2,2% tahun 2007. Pada tahun 2008, perekonomian AS diperkirakan akan terus merosot ke level 1,9%, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan berkisar 7,1% pada tahun 2008.

Perekonomian zona Asia Tenggara diperkirakan mencatat pertumbuhan sekitar 10% tahun 2007, karena diperkuat oleh laju ekonomi RRC sekitar 11,3%. Zona ekonomi Asia Tenggara mencakup Kamboja, Cina, Fiji, Indonesia, Kiribati, Korsel, Laos, Malaysia, Marshall Islands, Micronesia, Mongolia, Palau, Papua New Guinea, Filipina, Samoa, Solomon Islands, Thailand, Timor Timur, Tonga, Vanuatu, dan Vietnam.<sup>8</sup>

Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi itu memiliki signifikan bagi perbaikan kualitas hidup rakyat khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat, penyerapan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan menjamin pelestarian lingkungan? Untuk

menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan dua teori yaitu *economic growth theory* (pertumbuhan ekonomi) dan *uneconomic growth theory*.<sup>9</sup> Sedangkan asumsi utama dari tulisan ini, yaitu bahwa jika tidak hati-hati dan kurang cermat membaca pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan rakyat suatu negara mudah terjebak pada ilusi atau paradoks pertumbuhan berupa pertumbuhan ekonomi yang tidak ekonomis, tidak ramah lingkungan, dan tidak sustainabel. Tidak terkecuali rakyat, pemerintah, dan negara NKRI pada tahun 2008.

### Teori dan Kritik Pertumbuhan Ekonomi

Kelahiran konsep dan teori pertumbuhan ekonomi bermula dari deskripsi awal pemikir ekonomi Ibn Khaldun tahun 1377 melalui karyanya *Muqaddimah*<sup>10</sup>. Ibn Khaldun

<sup>9</sup> Herman E. Daly, "Uneconomic growth in theory and in practice," *The First Annual Feasta Lecture*. Dublin, 1999, hlm. 4-6.

<sup>10</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, 2:272-73, dikutip dalam Dieter Weiss (1995), "Ibn Khaldun on Economic Transformation", *International Journal of Middle East Studies* 27 (1), hlm. 29-37 [30].

<sup>8</sup> *Ibid.*

melukiskan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

*"When civilization [population] increases, the available labor again increases. In turn, luxury again increases in correspondence with the increasing profit, and the customs and needs of luxury increase. Crafts are created to obtain luxury products. The value realized from them increases, and, as a result, profits are again multiplied in the town. Production there is thriving even more than before. And so it goes with the second and third increase. All the additional labor serves luxury and wealth, in contrast to the original labor that served the necessity of life."*<sup>11</sup>

Gagasan Ibnu Khaldun itu kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Barat. Bahwa perekonomian dapat tumbuh, yang menghasilkan surplus ekonomi lebih besar. Surplus ini dapat dipergunakan untuk konsumsi, kesejahteraan, atau proyek *civic* dan proyek keagamaan lainnya. Semula anggapan hanya rata-rata kenaikan pajak dan penduduk dapat

menghasilkan surplus dana bagi suatu negara.

Kemudian era Merkantilis di Eropa memandang bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kenaikan total mata uang berupa perak dan emas yang dikontrol oleh negara. Teori 'Bullionist' tentang pertumbuhan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan untuk berdagang dengan negara-negara tertentu, akuisisi koloni untuk memasok bahan mentah lebih murah yang diolah dan dijual. Kebijakan negara mencakup promosi perdagangan dalam negeri dan industri. Akibatnya, sejak tahun 1700-an, tumbuh manufaktur, perdagangan, ekspor dan impor di zona pasar Eropa Barat.

Teori pertumbuhan ekonomi itu melahirkan penumpukan kekayaan nasional dan monopoli yang merangsang seseorang mengeksploitasi suatu pasar atau sumber ekonomi. Bahwa pelaku ekonomi akan meraup seluruh profit dari pasar jika semua kompetitor lainnya disingkirkan. Dampak dari paham ini pernah dirasakan oleh rakyat di zona NKRI ketika VOC atau *Dutch East India Company* memegang monopoli yang dihadiahkan oleh negara Belanda untuk

<sup>11</sup> *Ibid.*

melakukan eksploitasi sumber-sumber ekonomi dan monopoli perdagangan di Indonesia selama 300 tahun lebih hingga awal tahun 1940-an.

Era konsep pertumbuhan ekonomi Merkantilis bahwa perdagangan memacu pertumbuhan itu berakhir. Ketika muncul paham lain seperti kritik dari David Hume dan Adam Smith, peletak dasar dari ekonomi politik, bahwa kapasitas produksi adalah pilar utama dari pertumbuhan, peningkatan kapital dan kesejahteraan negara. Baik Hume maupun Adam Smith berpendapat bahwa agrikultur penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan manufaktur sangat penting bagi seluruh perekonomian negara.

Salah satu cara menghitung pertumbuhan ekonomi dikembangkan pula oleh sejumlah ahli, seperti Solow-Swan Growth Model dari Robert Solow dan Trevor Swan pada tahun 1950-an.<sup>12</sup> Metode ini melibatkan serangkaian persamaan pola hubung-

an dari *labor-time*, *capital goods*, *output*, dan *investment*. Model pertumbuhan seperti ini memandang peran teknologi sangat krusial bahkan penting bagi akumulasi kapital. Asumsi model ini yaitu setiap negara akan menggunakan sumber-sumber atau modalnya secara efisien dan terdapat *diminishing returns* bagi pertumbuhan kapital dan lapangan kerja.

Dari dua premis tersebut, model neo-klasik ekonomi menyusun tiga prediksi tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu *pertama*, pertumbuhan kapital lapangan pekerjaan menciptakan pertumbuhan ekonomi, karena orang akan semakin produktif jika ada modal; *kedua*, negara miskin yang kekurangan kapital per orang akan tumbuh semakin cepat karena setiap investasi kapital akan menghasilkan return lebih tinggi daripada negara industri kaya dengan kapital kaya; *ketiga*, karena *diminishing returns* terhadap kapital, setiap perekonomian akhirnya mencapai suatu fase tanpa pertumbuhan baru di sektor kapital akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fase ini disebut "steady state."

Model neo-klasik itu mencatat bahwa setiap negara dapat mengatasi 'steady state' dan melanjutkan per-

<sup>12</sup> Robert M. Solow (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth," *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), hlm. 65-94; Trevor W. Swan (1956). "Economic Growth and Capital Accumulation", *Economic Record*, 32, hlm. 334-61.

tumbuhan dengan melakukan investasi pada teknologi baru.<sup>13</sup> Pada awal abad 20, model ini menjadi rujukan dari berbagai kebijakan ekonomi sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, tujuan kebijakan pemerintah di ekonomi ialah mendorong kegiatan ekonomi tanpa memacu lonjakan level umum dari harga barang dan jasa. Atau meningkatkan GDP tanpa menciptakan inflasi.

Teori pertumbuhan ekonomi tahun 1970-an berpendapat bahwa perekonomian setiap negara dapat melompat dari satu fase pembangunan ke fase pembangunan lainnya melalui suatu 'virtuous cycle'. Siklus pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh investasi sektor pendidikan, infrastruktur, dan investasi swasta yang menciptakan tahap ekonomi produktif bagi suatu negara.<sup>14</sup>

Pada tahun 1980-an, model Solow dikembangkan berupa eksplanasi matematis tentang kemajuan teknologi.<sup>15</sup> Konsep baru pertumbuhan

ini juga memasukkan konsep tentang human capital, skills dan knowledge yang membuat tenaga kerja produktif. Tidak seperti physical capital, human capital meningkatkan rates of return. Oleh karena itu, secara umum terdapat returns konstan atas kapital dan perekonomian setiap negara tidak pernah mencapai fase 'steady state'. Pertumbuhan tidak menjadi lamban ketika terjadi akumulasi kapital, tetapi rata-rata pertumbuhan bergantung pada bentuk-bentuk investasi kapital pada suatu negara, seperti human capital melalui pendidikan dan perubahan teknologi melalui inovasi.<sup>16</sup>

GDP per kapita riil dari suatu perekonomian negara seperti NKRI sering dipergunakan sebagai indikator rata-rata pertumbuhan *standard of*

<sup>13</sup> Elhanah Helpman, *The Mystery of Economic Growth*, Harvard University Press, 2004.

<sup>14</sup> Case, K.E., and Fair, R.C. (2006). *Principles of Macroeconomics*. Prentice Hall.

<sup>15</sup> Lucas, Robert (1988). "On the Mechanics of Economic Development". *Journal of Monetary Economics* 22: 3-42. ; Elhanah Helpman, *The Mystery of Economic Growth*, Harvard University Press, 2004.;

<sup>16</sup> Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, Notes on the Theory of the Big Push", dalam Ellis, editor, *Economic Development for Latin America* (1961). Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, "Criteria for Evaluation of National Development Effort", *Journal of Development Planning* v 1 (1969).

*living* dari warga negara. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai indikasi pertumbuhan rata-rata *standard of living*. Sekurang-kurangnya ada empat kritik terhadap pemahaman pertumbuhan ekonomi seperti ini<sup>17</sup> yaitu (1) pertumbuhan membawa akibat-akibat negatif terhadap kualitas hidup. Banyak hal yang mempengaruhi kualitas hidup, seperti lingkungan tidak diperdagangkan atau tidak terukur di suatu pasar dan faktor-faktor ini umumnya kehilangan nilainya ketika pertumbuhan terjadi; (2) pertumbuhan mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan artifisial. Industri memacu konsumen menambah cita rasa baru barang dan jasa yang menjadi preferensi pertumbuhan. Akibatnya, keinginan diciptakan, dan konsumen melayani pertumbuhan itu, dan bukan 'the master' dari setiap pertumbuhan ekonomi; (3) pertumbuhan ekonomi sering merusak sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui, seperti fossil fuels secara masif dan destruktif;<sup>18</sup> dan

(4) distribusi income atau pendapatan. Pertumbuhan dapat memacu dan mempromosi ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi rakyat.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diyakni sebagai kenaikan nilai dari produksi barang dan jasa dari suatu tata-ekonomi negara. Umumnya pertumbuhan ekonomi itu diukur sebagai rata-rata kenaikan prosentase GDP (*gross domestic product*). 'Pertumbuhan' (*growth*) biasanya dikalkulasi dalam istilah-istilah dan indikator yang sangat riil, seperti inflasi. Dalam ilmu ekonomi, "economic growth" atau "economic growth theory" khusus berkenaan dengan pertumbuhan dari output ekonomi seperti produksi. Selain itu, "economic growth" diukur sebagai perubahan persentase tahunan dari GDP.

Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat signifikan bagi suatu negara, pemerintah, dan rakyat. Karena per kapita GDP riil dari suatu perekonomian seperti NKRI sering dipergunakan sebagai indikator rata-rata standar kehidupan warga negara di suatu negara seperti NKRI. Bahwa pertumbuhan ekonomi seakan-akan merupakan indikasi dari rata-rata

<sup>17</sup> Meadows, D.L., Meadows, D.L., and Randers, J. (1973) *The Limits to Growth* Washington, DC: Potomac Associates.

<sup>18</sup> Xavier Sala-i-Martin, "Global Inequality Fades as the Global Economy Grows." *Index of Economic Freedom*, 2007.

standar hidup rakyat (*standard of living*) secara ekonomis.

Cara pandang seperti tersebut di atas selama ini selalu memicu salah-paham tentang ekonomi. Karena ada kurang lebih 8 (delapan) masalah muncul, jika menggunakan per kapita GDP atau pertumbuhan ekonomi untuk mengukur kesejahteraan rakyat, yakni (1) GDP per kapita beragam menurut nilai kelompok barang atau jasa yang dijadikan dasar perhitungan tahunan; (2) GDP per kapita tidak menyediakan sctiap informasi relevan bagi distribusi pendapatan rakyat di suatu negara, termasuk NKRI; (3) per kapita GDP tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternalitas negatif seperti kerusakan lingkungan hidup akibat pertumbuhan ekonomi; (4) per kapita GDP tidak memasukkan faktor eksternal positif yang mungkin berasal dari jasa-jasa seperti pendidikan dan kesehatan; (5) per kapita GDP mengabaikan nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar domain ekonomi pasar, seperti ongkos menikmati hiburan dan *hiking*; (6) per kapita GDP mengabaikan sektor-sektor informal ekonomi atau hanya sebagai perkiraan-perkiraan saja; (7) per kapita GDP tidak memperhitungkan pembelian-pembelian ba-

rang yang tidak diproduksi pada tahun anggaran yang dihitung, seperti membeli mobil-mobil dan rumah-rumah; dan (8) per kapita GPD tidak menyediakan informasi apresiasi atau depresiasi barang-barang yang telah diproduksi yang mungkin merefleksikan perubahan dalam standar hidup rakyat seperti dilapidasi atau bobroknya bangunan-bangunan hunian rakyat.

Oleh karena itu, mengingat luasnya cakupan difisiensi GDP, maka pertumbuhan ekonomi hanya dipakai oleh para ekonom sebagai salah satu indikator saja dan tidak bersifat absolut. Di sisi lain, ekonomi dan pembuatan kebijakan ekonomi juga menggunakan metode mengukur inequalitas seperti Gini Coefficient atau metode mengukur faktor-faktor eksternalitas seperti polusi dan depleksi sumber ekonomi seperti *Green Gross Domestic Product*.

### Skenario 'Economic Growth' NKRI Tahun 2008

Aliran investasi asing langsung (*foreign direct investment/*FDI) ke zona NKRI, menurut laporan Pemerintah, awal Januari tahun 2008, naik seki-



tar 73% pada tahun 2007 pada level 10,3 miliar dollar AS.<sup>19</sup> Data itu belum termasuk sektor industri seperti minyak, gas, perbankan, dan asuransi. Investor asing terutama melakukan investasi pada sektor telekomunikasi, farmasi, pulp, makanan, yang memang memiliki pasar potensial di zona NKRI berpenduduk sekitar 234 juta jiwa. Data BKPM menyebutkan bahwa FDI naik dari 5,97 miliar dollar AS tahun 2006. FDI yang disetujui naik ke level 40,14 miliar dollar AS tahun 2007, dari 15,65 miliar dollar AS pada tahun 2006. Sedangkan investasi aktual dalam negeri naik sekitar 70% ke level 34,9 triliun rupiah pada tahun 2007. Investasi langsung dalam negeri yang disetujui naik sekitar 16% ke level 188,9 triliun rupiah dari 162,8 triliun rupiah tahun 2006.<sup>20</sup>

Penjualan kendaraan bermotor di NKRI diperkirakan naik sekitar 36% hingga 434.000 unit pada tahun 2007. Ini sinyal pemulihan sektor industri otomotif dari kondisi slow-down menyusul kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan

Oktober tahun 2005.<sup>21</sup> Sedangkan total penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2006 berkisar 318.904 unit.<sup>22</sup>

Inflasi di zona pasar NKRI diperkirakan mencapai 5% pada tahun 2007, jika harga minyak dunia masih tinggi. Ini salah satu perkiraan dari sumber Bank Indonesia (BI) dirilis awal tahun 2008 dari Jakarta seperti dikutip oleh pers internasional.<sup>23</sup> Salah satu pilihan BI yaitu mempertahankan likuiditas yang diperkirakan turun ke level 14% tahun 2008 dari 15% tahun 2007.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi NKRI diperkirakan mencapai 6% tahun 2007 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi NKRI tahun 2008 sekitar 7%. Selain menurunkan BI rate sekitar 25 bps hingga 8,25% tanggal 6 Desember tahun 2007, BI merasa optimis bahwa inflasi dapat diturunkan ke level 6 + atau -1% kisaran target inflasi tahun 2007.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> "Indonesia's 2007 vehicle estimated higher than target," *Reuters*, 7 Januari, 2008.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> "Indonesian Inflation Seen At 5%-Central Bank," *Nasdaq*, 6 Januari, 2008.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> "Indonesia says foreign direct investment up 73% in '07," *Reuters*, 10 Januari 2008.

<sup>20</sup> *Ibid.*

BI juga mencatat perkiraan risiko efek spiral dari lonjakan harga-harga minyak dunia yang dapat memacu inflasi pada tahun 2008. Indikator ekonomi NKRI lainnya yaitu kisaran CPI pada level 6,59% dari level 6,71% bulan November tahun 2007.

BI mungkin mempertahankan BI rate pada level 8% jika melihat kecenderungan kenaikan inflasi di zona NKRI dan lonjakan harga minyak dunia. Apalagi, kisaran inflasi pada bulan Desember tahun 2007 diperkirakan menyentuh level 1,1%<sup>25</sup>. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk mencegah lonjakan inflasi. Apalagi belakangan ini, rakyat NKRI cukup besar bergantung pada pasokan makanan impor. Salah satu perkiraan menyebutkan bahwa sekitar 60-70% dari konsumsi makanan rakyat NKRI adalah makanan impor.<sup>26</sup> Karena itu, pemerintah perlu lihai mengatur distribusi dan pasokan makanan pada tahun 2008. Sebab selama ini kelaparan sering terjadi karena ketimpangan distribusi pangan dunia.

Cadangan devisa (*foreign exchange*) NKRI naik sekitar 34% dari total cadangan devisa tahun 2006 ke level 57,04 miliar dollar AS pada akhir tahun 2007. Menurut BI, pemicunya ialah peningkatkan penerimaan negara dari ekspor minyak.<sup>27</sup> Di tengah lonjakan harga minyak dunia, organisasi eksportir minyak dunia OPEC diperkirakan akan meningkatkan produksi minyak sekitar 500.000 barel per hari. Ini salah satu skenario dari rencana pertemuan OPEC pada 1 Februari tahun 2008 di Vienna, jika pasokan minyak dunia tidak memadai.<sup>28</sup>

Sedangkan *base money* di zona pasar NKRI naik ke level 379,58 triliun rupiah pada akhir Desember tahun 2007 dari 311,17 triliun rupiah pada akhir November tahun 2007. Begitu pula, sirkulasi rupiah dan cadangan minimum perbankan yang ditempatkan di BI naik selama bulan Desember tahun 2007.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> "BI likely to maintain its key rate," *Antara*, 7 Januari, 2008.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> "Indonesia end-2007 forex reserves up 34 percent at 57.04 billion US dollars," *Thomson Financial News*, 6 Januari, 2008.

<sup>28</sup> "OPEC may raise output at Feb 1 meet: Indonesia OPEC gov," *Reuters* 2 Januari, 2008.

<sup>29</sup> *Thomson Financial News, op. cit.*

Pemerintah NKRI melihat peluang aliran investasi senilai 5 miliar dollar AS dari Timur Tengah tahun 2008 ini. Sektor yang dibidik ialah jasa keuangan, sumber alam, infrastruktur, properti, dan plantations.<sup>30</sup>

Dari Tokyo, Pemerintah Jepang telah memilih 41 negara prioritas untuk asistensi keuangan Jepang di bidang perubahan iklim untuk negara-negara berkembang dalam rangka mengatasi pemanasan global.<sup>31</sup> Implementasi awal dari mekanisme keuangan Jepang ini memilih 11 negara, termasuk NKRI, seperti menerapkan proyek-proyek *energy-saving* dan kerangka-kerangka kerja lainnya. Dasar pertimbangan pilihan dan prioritas asistensi Jepang yakni kebutuhan dana, upaya konkret pemerintah dan rakyat memerangi pemanasan global, pengaruh internasional, dan kadar pemahamannya tentang pemanasan global serta kerjasama dengan prakarsa-prakarsa Jepang.

Dari 11 negara (Kenya, Ethiopia, Gabon, Burkina Faso, Ghana, Madagaskar, Indonesia, Malaysia, Guyana,

Meksiko, Micronesia) implementasi awal asistensi keuangan Jepang ini, NKRI telah mencapai kesepakatan dasar awal tentang kerangka kerja asistensi keuangan. Kesepakatan itu berbunyi, bahwa menurut skema keuangan dari Jepang, bantuan finansial dapat disediakan dalam dua bentuk yakni bantuan finansial langsung atau bantuan finansial tidak langsung melalui organisasi-organisasi internasional seperti PBB. Melalui skema bantuan langsung, Jepang sedang mempertimbangkan pengembangan suatu mekanisme 'green development' untuk melakukan investasi proyek-proyek di negara-negara berkembang guna mengurangi emisi-emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emissions*), menyediakan grant aid untuk proyek-proyek yang difokuskan pada upaya mengatasi pemanasan global (*global warming*) dan menciptakan pinjaman (*loans*) dalam nilai tukar yen Jepang.<sup>32</sup>

Ritel asal NKRI masih harus membutuhkan payung dari Pemerintah melalui peraturan pemerintah yang

<sup>30</sup> "Indonesia looking at \$5b in investment from Middle East," *The Jakarta Post*, 4 Januari, 2008.

<sup>31</sup> "Japan Select 41 Priority Countries For Aid on Climate Change," *Kyodo News*, 7 Januari, 2008.

<sup>32</sup> *Ibid.*

membatasi operasi perusahaan ritel internasional, seperti Carrefour. Misalnya, peraturan presiden awal tahun 2008 menyebutkan bahwa perusahaan ritel tidak dibolehkan memiliki supermarket dengan *floor space* kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> dan department store dengan *floor space* kurang dari 2.000 m<sup>2</sup>. Peraturan ini merupakan salah satu dari Investment Negative List yang baru yang melarang investor luar negeri dari operasi di 47 sektor usaha seperti mini-markets, community stores, dan convenience stores.<sup>33</sup>

BI mungkin akan tetap mempertahankan benchmark interest rate pada kisaran 8%. Ini salah satu hasil survei Bloomberg News pada 14 ekonomi awal Januari 2008. Karena lonjakan harga minyak dunia pada level 100 dollar AS per barel dapat memacu inflasi pada kisaran 6 – 7%.<sup>34</sup> Sedangkan perkiraan BI, kisaran inflasi sekitar 4-6% tahun 2008. BI telah memotong benchmark rate sekitar 4,75% sejak Mei tahun 2006

untuk memacu pertumbuhan ekonomi NKRI pada kisaran 6,8% tahun 2008.<sup>35</sup>

Akibat lonjakan harga minyak dunia, beberapa perusahaan telah menaikkan harga-harga barang dan jasa akibat lonjakan biaya distribusi dan harga bahan baku. Produsen mie instan terbesar dunia, PT Indofood Sukses Makmur, misalnya, menaikkan harga Indomie, Sarimi, dari Supermie sekitar Rp 100,- sejak 19 November 2007.<sup>36</sup>

### Skenario 'Uneconomic Growth' NKRI 2008

Indikator dan angka-angka pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan hal-hal fundamental dari kemajuan manusia, khususnya pelestarian lingkungan alam, keselamatan kehidupan, dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, salah satu pespektif global saat ini menyatakan bahwa tata-dunia sangat menghancurkan nilai-nilai dan kehidupan umat manusia selama 20 tahun terakhir.

<sup>33</sup> "Indonesia Imposes Restrictions on Foreign Retailing Companies," *Asia Pulse*, 3 Januari 2008.

<sup>34</sup> "Indonesia May Keep Benchmark Rate Unchanged on Inflation Risks," *Bloomberg*, 7 Januari, 2008.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Karena tata global hanya digerakkan oleh ambisi profit, efisiensi, pertumbuhan dan monopoli. Akibatnya, tata dunia seperti itu tidak hanya menghancurkan nilai dan kehidupan manusia, tetapi juga seluruh tata kehidupan atau sistem penyangga kehidupan planet bumi, alam, dan dirinya sendiri.<sup>37</sup> Ini salah satu wajah dari kelahiran dan evolusi tata dunia modern yang memicu perang, pelanggaran HAM, kekerasan ekonomi, dan merusak lingkungan di zona strategis dunia seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Barat. Sisi suram itu dapat digambarkan dalam 4 hal, yakni karastrofe iklim, peak oil, kelangkaan makanan, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, tata ekonomi harus dipandang sebagai salah satu sub-sistem dari eko-sistem, seperti waktu, *matter*, *energy*, zona atau teritorial, sistem informasi, dan tata-pemerintahan suatu negara. Inilah inti dari pemikiran tentang *uneconomic growth theory* selama ini.<sup>38</sup> Dalam hal ini, seharusnya angka-angka pertumbuhan ekonomi dipahami dan dinilai atau dievaluasi dari konteks sistem seperti ini.

<sup>37</sup> Nafeez Mosaddeq Ahmed, "The hidden holocaust — our civilizational crisis, part 3: The end of the world as we know it?," Online Journal, 7 Januari, 2008, hlm. 1.

Selain itu, sejumlah variabel dan faktor eksternalitas sebetulnya lebih memperlihatkan bahwa saat ini negara dan rakyat NKRI sedang mengalami fase *uneconomic growth*. Ada sejumlah dasar teori untuk mendukung pandangan ini. *Pertama*, sejumlah ahli berpendapat bahwa faktor kepercayaan adalah penentu dari setiap kemajuan kesejahteraan rakyat atau kemajuan suatu tata ekonomi negara, orang per orang, sektor industri, dan suatu masyarakat. Kemajuan ekonomi ditentukan oleh level kepercayaan pada suatu tata-sosial-ekonomi masyarakat. Misalnya, Paul Zak, professor ekonomi dari Universitas Claremont, Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat, kepercayaan antara anggota masyarakat sangat penting untuk mendorong tumbuhnya investasi dan dapat pula mengurangi biaya dalam melakukan bisnis. Menurut Paul Zak, jika kepercayaan antara anggota masyarakat kurang dari 30 persen, maka kemiskinan akan cenderung naik.

Pernyataan Paul Zak ini sangat me-

<sup>38</sup> Herman E. Daly, "Uneconomic growth in theory and in practice," The First Annual Feasta Lecture. Dublin, 1999, hlm. 4-6.

narik untuk dikaji lebih jauh, paling tidak karena dua alasan yaitu *pertama*, kepercayaan antara anggota masyarakat adalah modal utama untuk menyejahterakan rakyat. Jika pengertian antara anggota masyarakat di sini dikaitkan ke dalam konteks yang lebih luas berarti harus ada kepercayaan antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat), antara suatu lembaga dengan rakyat atau antara lembaga dengan lembaga lainnya. *Kedua*, rendahnya kepercayaan satu sama lain ternyata akan menaikkan tingkat kemiskinan. Sehingga pertanyaannya adalah adakah relevansi pernyataan Paul Zak itu, dengan tingkat kemakmuran ekonomi bangsa Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan ini baiklah kita menyimak beberapa indikator ekonomi yang dipublikasikan oleh media cetak beberapa waktu lalu tentang ekonomi Indonesia. Diberitakan bahwa pekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3%, dengan tingkat inflasi sampai akhir tahun sebesar 6,4%. Angka ini cukup bagus karena mengindikasikan adanya perbaikan di bidang ekonomi yang signifikan. Dengan angka pertumbuhan seperti itu, angka kemiskinan rakyat di NKRI seharusnya semakin turun.

Namun masyarakat dapat terkejut ketika media massa mengutip lagi angka kemiskinan Indonesia yang dipublikasikan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu oleh Bank Dunia dan BPS (Biro Pusat Statistik) di mana masing-masing sebesar 49,5 % dan 16,5%. Perbedaan yang sangat mencolok. Sehingga kemudian muncul keraguan dalam masyarakat, data manakah yang layak dipakai sebagai acuan? Perbedaan angka itu bisa jadi karena indikator yang digunakan berbeda-beda, sehingga menghasilkan dua angka yang berbeda pula. Jika benar seperti itu, semakin menjadi aneh, sebab bagaimana mungkin untuk mengukur satu hal yang sama tetapi menggunakan komponen atau cara yang berbeda? Karena itu, tetap saja angka itu menyimpan keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam ilmu ekonomi, salah satu alat untuk mengukur kemakmuran ekonomi suatu bangsa biasanya menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) di mana pada kuartal pertama pada tahun 2007 sebesar 6%, yang mana angka itu jauh lebih rendah dari tahun 1995 ( Era Soeharto ) yaitu sebesar 8,2% ( *Kom-*

pas, 22 Desember 2007). Melihat angka-angka seperti ini, tidak heran kalau masyarakat mempertanyakan kembali apa benar ekonomi Indonesia semakin membaik padahal GDP tidak lebih baik dari tahun 1995. Dengan demikian pertanyaan lanjutannya adalah bisakah angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 16,5% itu layak dipercaya?

*Kedua*, inflasi salah mengerti atau salah hitung? Apa yang menjadi masalah utama ketika kita membaca indikator ekonomi yang disebutkan di atas? Mengapa ketika angka-angka pertumbuhan ekonomi cenderung naik, tetapi masih banyak rakyat yang miskin? Apakah inflasi yang rendah merupakan berita baik? Atau sebaliknya apakah kalau inflasi yang tinggi merupakan berita buruk? Sesungguhnya yang perlu ditakutkan pada saat ini adalah karena hampir semua harga barang untuk kebutuhan pokok cenderung naik dan pada titik inilah kita mesti waspada, karena sebenarnya kita sedang mengalami masalah ekonomi yang serius.

Sekarang ini pemerintah mengatasinya dengan berbagai jenis subsidi, tetapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena harga-harga kebutuh-

an pokok yang cenderung naik sejak Januari tahun 2006 secara cepat akan menyulitkan pembeli, meskipun menolong penjual.

Secara teori, inflasi terjadi jika semua harga barang mengalami kenaikan, termasuk upah dan gaji tenaga kerja. Namun kalau kita perhatikan apa yang terjadi di NKRI, semua harga barang kebutuhan pokok cenderung naik sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) menjelang akhir tahun 2005 yang lalu, sementara di sisi lain, upah dan gaji tenaga kerja mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Kondisi ini tentu akan memicu kesalahan perhitungan pada angka kemiskinan yang terjadi.

Para ekonom selalu mengasumsikan bahwa suku bunga akan merefleksikan inflasi yang diharapkan (inflation expectations), karena baik pemberi pinjaman (bank) atau peminjam pada dasarnya akan memperhatikan keuntungan ril yang diperoleh dan biaya ril yang dikeluarkan. Sebagai ilustrasi sederhana, jika pemberi pinjaman (bank) mengharapkan keuntungan ril sebesar 4% maka akan mengharapkan pembayaran bunga sebesar 7% apabila terjadi kenaikan harga sebe-

sar 3% per tahun. Namun jika inflasi yang diharapkan naik menjadi 5%, maka bank akan mengharapkan suku bunga sebesar 9%.

Hal yang sama pun terjadi pada sisi peminjam (nasabah), di mana ia harus memperhitungkan biaya riil yang dikeluarkan jika bank ingin mendapat keuntungan sebesar 4%, ia akan membayar bunga sebesar 7% dengan tingkat inflasi yang diharapkan sebesar 3% dan 9% untuk inflasi yang diharapkan sebesar 5%. Formula inilah yang diperkenalkan oleh Irving Fisher pada lebih dari setengah abad yang lalu. Pada kondisi ini sebenarnya baik peminjam (nasabah) dan pemberi kredit (bank) seperti juga majikan dan buruh akan pada posisi yang berbeda jika menghadapi tingkat inflasi dengan nilai yang sama.

Dalam kehidupan nyata, penjelasan di atas tidak persis sama dan bahkan sama sekali berbeda. Inflasi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan suku bunga yang tinggi. Misalnya ketika inflasi naik sebesar 5% misalnya, suku bunga mungkin hanya akan mengalami kenaikan sebesar 3%, karena ketika inflasi mengalami kenaikan, maka suku bunga riil cenderung turun. Turunnya suku bunga riil akan meng-

akibatkan naiknya permintaan modal dan menstimulasi investasi. Dalam kondisi seperti ini di mana inflasi cenderung naik, biasanya sektor perumahan akan cenderung booming.

Tetapi apa yang terjadi di NKRI? Angka inflasi relatif rendah, suku bunga cenderung menurun, tetapi mengapa bisnis perumahan (*property*) justru kian melambung. Anehnya, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang tidak tinggi, penjualan rumah di Indonesia terus meningkat. Itu berarti para pembeli rumah / *property* sebetulnya para pemilik dana yang besar, karena dengan membeli rumah mereka akan memperoleh *capital gain* yang cukup besar di kemudian hari.

Dengan lain perkataan, boomingnya bisnis perumahan, sebetulnya tidak membawa manfaat yang besar untuk rakyat kecil, karena harga rumah yang tidak terkontrol sekarang ini, tidak dapat dijangkau oleh rakyat yang berpenghasilan Rp. 1,5 juta per bulan. Inilah anomali ekonomi Indonesia yang membuat masyarakat sulit mempercayai data-data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.

Fenomena di atas dijelaskan oleh



Robert Lucas dari University of Chicago dan Thomas Sargent dari University of Minnesota dengan mengatakan, "*people or economic agents will not act stupidly. They will take advantage of all available information and make decision that maximize their own advantage*". Patut diakui, para pemilik modal atau golongan yang berpendapatan besar akan selalu menggunakan teori efisiensi pasar meskipun dengan berbagai macam anomali.

Karena para pemilik modal atau yang berpendapatan tinggi selalu mampu membuat pilihan dan memperhitungkan resiko dalam membuat keputusan ekonomi. Sebaliknya bagi masyarakat miskin mereka tidak mempunyai pilihan yang banyak atas keputusan ekonomi yang mereka buat. Contoh yang paling jelas adalah ketika harga-harga naik yang dipicu oleh naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) akhir tahun 2005, masyarakat miskin semakin sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan membiayai pendidikan.

Padahal dua kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar untuk sebagian besar rakyat. Ketika mereka - sebelum kenaikan harga

minyak - memiliki pendapatan sebesar Rp. 1,5 juta per bulan misalnya, masih mampu untuk membeli kebutuhan pokok dan menyekolahkan anak di Sekolah Negeri, tetapi ketika BBM naik tajam, maka pendapatan sebesar itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

*Ketiga*, Penurunan Suku bunga bank. Isu ekonomi yang paling kritis untuk dicermati dalam melihat prospek ekonomi pada tahun 2008 ini salah satunya adalah suku bunga kredit bank. Kita memang sudah melihat melalui laporan bank Indonesia, suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sudah turun ke angka 8 %, tetapi bunga kredit untuk kebutuhan produktif belum turun secara signifikan.

Yang justru mengalami penurunan cukup tajam adalah suku bunga untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti kredit untuk kendaraan bermotor, kartu kredit, dsb. Kebijakan ini sama sekali tidak efisien, karena akan memacu masyarakat untuk lebih konsumtif daripada produktif. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang sekarang dikatakan membaik lebih karena didorong oleh faktor konsumsi, bukan oleh faktor

produksi. Secara teori ekonomi, jika penggunaan barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi dikurangi, maka akan mendorong masyarakat untuk menabung.

Pada sisi lain, pemerintah harus benar-benar mengontrol penggunaan anggaran dan pajak, sehingga masyarakat akan mencoba untuk menabung dan pertumbuhan kredit bisa meningkat. Kalaupun biaya kredit atau pinjaman berkurang, suku bunga akan tetap kecil. Rendahnya suku bunga berarti, rendahnya biaya modal (*cost of capital*) untuk bisnis.

Dengan demikian akan meningkatkan laba usaha yang akan pada akhirnya para pengusaha akan melakukan investasi dengan cara mendirikan usaha (pabrik) baru. Jika siklus ini terjadi maka dunia bisnis akan mampu menjual hasil produksinya ke masyarakat dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian masyarakat umum dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

### Skenario Spending Control

Sehubungan dengan anggaran belanja pemerintah, penulis mencoba

mengambil ilustrasi apa yang dilakukan oleh Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat tahun 1993 – meskipun membandingkan kondisi ekonomi Amerika dan Indonesia bisa salah kaprah -di mana ia bertekad untuk mengurangi defisit anggaran sebesar USD 500 milyar.

Akibat dari kebijakan itu, pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun memberikan kontribusi yang besar untuk pengurangan atau penurunan suku bunga, yang mana akhirnya merangsang naiknya penjualan rumah (*property*). Pengurangan anggaran ini menurut kebijakan Pemerintah Amerikat pada waktu itu selain untuk menurunkan suku bunga juga merangsang tumbuhnya industri baru, sehingga akan mendorong daya beli masyarakat dengan memanfaatkan pendapatannya untuk hal-hal yang produktif. Dengan demikian pada bulan Agustus tahun 1993 pemerintahan Presiden Clinton mampu menurunkan tingkat pengangguran dari 7% menjadi 6,7%.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah di zona NKRI? Selama ini, program-program pengentasan kemiskinan selama ini sering gagal karena mengabaikan rakyat dan lingkungan-

nya di daerah-daerah sampai desa-desa. Oleh karena itu, setiap upaya pengentasan kemiskinan harus menerapkan 7 (tujuh) strategi dasar,<sup>39</sup> yaitu (1) nilai-nilai kemanusiaan harus diterapkan dalam setiap kebijakan di daerah-daerah (Psl 27 ayat 2 UUD 1945), (2) nilai-nilai dan tradisi lokal dilindungi (Psl 32 ayat 1 UUD 1945), (3) menghargai etika dan HAM (Bab XA UUD 1945), (4) melestarikan lingkungan hidup (Psl 33 ayat 4 UUD 1945), (5) menerapkan prinsip-prinsip *good-governance*, *transparency*, dan akuntabilitas publik serta efisiensi pasar, (6) mengalokasikan anggaran secara tepat (Psl 23 ayat 1 UUD 1945), dan (7) menciptakan keahlian-keahlian rakyat (Psl 31 UUD 1945).

Perbaikan atas kekeliruan selama ini yang mengabaikan rakyat dan lingkungan alam di desa-desa dapat dilakukan melalui penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pu-

sat dan Daerah, PP No. 104 sampai No. 107 Tahun 2000. UUD 1945 menetapkan BAB XA tentang HAM. Misalnya, hidup sejahtera adalah hak asasi rakyat (Psl 28H ayat 2 UUD 1945) dan tanggungjawab negara (pemerintah).

Terkait dengan amanat UUD dan UU tersebut di atas, hal sangat penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah ialah mengontrol aliran dana, khususnya aliran dana ke daerah-daerah untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran, akurasi alokasi anggaran, akuntabilitas, transparansi, dan menyejahterakan rakyat serta melestarikan lingkungan. Misalnya, dana dialokasikan secara tepat ke program-program sosial untuk tercapainya keadilan dan pemerataan (Pasal 22 d, UU No. 32/2004) dan layanan masyarakat (Pasal 20 1g UU No. 32/2004).

Pengalaman empiris sejumlah negara memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan atas anggaran. Misalnya, negara bagian Kerala (India), dengan pendapatan per kapita paling rendah di dunia, memiliki usia harapan hidup sekitar 73 tahun. Angka ini kurang lebih sebanding dengan *life expectancy* di negara-negara paling maju

<sup>39</sup> Michael Camdessus, *Poverty Reduction*, IMF Strategy Papers, 2000, hlm. 2-3.

di dunia dewasa ini. Hal serupa juga terjadi di Cile dengan skor *life expectancy* 74 tahun, Kuba dengan skor *life expectancy* 75 tahun, Costa Rica dengan skor *life expectancy* sekitar 76 tahun. Cile, RRC, Costa Rica, Kuba, Kerala, dan Sri Lanka yang melaksanakan program pendidikan dasar. Angka literasinya berkisar 90 persen, hampir sama dengan angka literasi kebanyakan negara berpendapatan tinggi. Jasa layanan kesehatan untuk rakyat tersedia. Jadi, pengentasan kemiskinan dapat dicapai jika melakukan program sosial riil untuk kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan.<sup>40</sup>

Selain itu, skenario pengawasan anggaran merupakan kunci mencapai kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pelestarian lingkungan didukung oleh teori dan studi ilmiah. Misalnya, Ivan Illich pernah mengkritik tajam kebijakan ekonomi yang cenderung memihak para pemodal besar.<sup>41</sup> Menurut Ivan

Illich, kebijakan ekonomi pemerintah seringkali menciptakan ketimpangan (*inequality*) atau jurang pemisah yang semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin atau antara perusahaan besar dan usaha kecil. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa para ekonom tidak memiliki alat yang efektif dalam pengukuran mereka untuk memasukan besarnya kerugian masyarakat atas terpenuhinya kepuasan yang tidak ada hubungannya dengan pasar. Modernisasi atas kebutuhan selalu menambahkan bentuk diskriminasi bagi kemiskinan. Kemiskinan yang dimodernisir kini telah menjadi pemandangan yang biasa bagi semua orang kecuali mereka yang amat sangat kaya.

Pemerintah adalah penentu kebijakan di bidang ekonomi, karena itu apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia? Menurut hemat penulis, apapun perdebatan kita tentang masalah ekonomi NKRI, sesungguhnya salah faktor kunci dalam membangun ekonomi negara adalah bagaimana pemerintah mengontrol penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh DPR RI sesuai ketentuan UUD 1945 hasil amandemen periode tahun 1999-2002.

<sup>40</sup> Dharam Ghai, "Social Development and Public Policies: Lessons from Successful Experiences", UNSRID, 1997.

<sup>41</sup> Ivan Illich, *Menggugat Kaum kapitalis*, Melibas, Jakarta, April 2001.

Rekomendasi tersebut di atas juga didukung oleh kajian teoretik ahli ekonomi. Misalnya, menurut Francis X. Cavanaugh, hanya ada satu realitas dalam ekonomi suatu negara yaitu: *Spending control*.<sup>42</sup> Sedangkan masalah suku bunga, investasi asing, hutang luar negeri, menurut Cavanaugh, lebih kepada masalah politik daripada masalah ekonomi. Sehingga, bila pemerintah ingin memajukan ekonomi rakyat, maka hal utama yang dilakukan segera adalah mengawasi setiap penggunaan anggaran yang telah ditetapkan itu. Sebab kalau kita berbicara tentang hutang luar negeri, tidak ada yang dapat dilakukan dengan itu, pemerintah dan rakyat wajib membayarnya. Kita tidak mempunyai pilihan lain.

Ada dua soal kalau kita mengontrol penggunaan anggaran yaitu *pertama*, menentukan dengan bijaksana, apa model anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol penggunaan anggaran agar dapat mengakomodasi kepentingan rakyat. Apakah anggaran yang sudah dibuat be-

nar-benar telah mengakomodasi kepentingan rakyat, termasuk pengangguran dan kemiskinan yang semakin besar. Karena kita kenal beberapa bentuk anggaran antara lain *The Unified budget* yang biasanya mengukur semua penerimaan dan pengeluaran secara keseluruhan. Kelemahan jenis anggaran atau budget seperti ini adalah tidak memperhitungkan *social security retirement*. Ada juga model anggaran (*budget*) lain seperti *Liberal budget*, *National Income and Product Budget (NIPA)*, *The full Employment Budget*.

*Kedua*, setelah menentukan model anggaran (*budget*) yang diambil, pemerintah harus mampu mengontrol penggunaan anggaran dan mampu pula mengurangi defisit anggaran dengan jumlah yang signifikan. Karena kalau pemerintah tidak mampu mengontrol penggunaan anggaran dan mengurangi defisit maka sulit diharapkan perbaikan ekonomi untuk tahun 2008 ini, dan bahkan bisa sebaliknya pembangunan yang dilakukan tidak akan menyentuh rakyat atau masyarakat umum karena pertumbuhan industri justru dapat menghasilkan kemiskinan yang dimodernisasi. □

<sup>42</sup> Francis X. Cavanaugh, *The Truth about the national Debt, Five Myths and One Reality*, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts, 1996.